

Ekologi Politis Air: Akses, Eksklusi, dan Resistensi

Bosman Batubara

Kandidat Ph.D. UNESCO-Institute for Water Education, Delft,
dan University of Amsterdam, Belanda

✉ bosman.batubara@gmail.com

SARAN PENULISAN PUSTAKA: BATUBARA, B. 2017. "Ekologi Politis Air: Akses, Eksklusi, dan Resistensi." *Wacana* 35: 3–23.

© 2017 PENULIS. Diterbitkan oleh INSISTPress (anggota Indonesian Society for Social Transformation [INSIST]). Tulisan ini disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0).



***Political Ecology*: Ekologi Politik, Politik Ekologi, Politik-Ekologi, atau Ekologi Politis?**

Apa terjemahan *political ecology* dalam bahasa Indonesia? Ada banyak jawaban untuk pertanyaan ini. Para akademisi menerjemahkannya secara bervariasi. White (2009), Arsel (2009), Afiff (2009), Darmanto dan Setyowati (2012), Sirimorok (2013), Astuti (2013), dan Cahyati (2014) menggunakan “ekologi politik”. Darmanto dan Setyowati (2012) juga menggunakan “politik ekologi”, sementara Novenanto (2015) memilih “politik-ekologi”. Sependek pencermatan saya, para penulis tersebut tidak menyampaikan alasan mengapa mereka memilih frasa tertentu dalam menerjemahkan *political ecology* ke dalam Bahasa Indonesia, kecuali catatan kaki dari Novenanto (2015: 4) yang menyebutkan, “Saya sengaja menggunakan istilah ‘politik-ekologi’, bukan ‘ekologi politik’—seperti halnya saya lebih sepakat penggunaan istilah ‘politik-ekonomi’ ketimbang ‘ekonomi politik’.”

Tulisan ini memilih menerjemahkan *political ecology* ke dalam bahasa Indonesia sebagai “ekologi politis” dengan dua alasan, yaitu alasan semantik dan filosofis. Dari sisi semantik, *political* dalam bahasa Inggris ialah kata sifat. Padanannya dalam bahasa Indonesia adalah “politis”.

Dari sisi filosofis, tulisan ini perlu memperlihatkan perbedaan antara “*politics*” dalam bahasa Indonesia: “politik”, dengan “*political*” dalam bahasa Indonesia: “politis”. Wilson and Swyngedouw (2014: 6) menjelaskan perbedaan ini dengan sangat jelas. “Politik” bagi mereka ialah “mekanisme teknokratik dan prosedur-prosedur konsensual yang beroperasi dan diterima begitu saja dalam kerangka demokrasi perwakilan, ekonomi pasar bebas, dan liberalisme kosmopolitan.” Sementara itu, “politis” ialah “ruang kontestasi dan pertautan yang antagonistik yang semakin dikoloni oleh ‘politik’.”

Dari pembedaan tersebut, secara sederhana dapat dinyatakan: meskipun demokrasi prosedural (politik) sudah berjalan, misalnya dalam proses pemilihan pemimpin, bukan berarti permasalahan-permasalahan “politis” seperti perbedaan akses terhadap air, ketimpangan kelas, masalah ras, dan lain-lain, sudah terselesaikan. Justru, secara paradoks, mekanisme politik seperti demokrasi perwakilan mengisi ruang perbedaan yang heterogen dengan tetap mengakui perbedaan-perbedaan tersebut, dan demokrasi perwakilan tetaplah satu agenda yang harus terus-menerus diperhatikan. Wilson and Swyngedouw (2014) mendasarkan pemahaman mereka pada berbagai karya filsuf kontemporer seperti Rancière, Žižek, dan Mouffe.

Mouffe (2005: 9), misalnya, memaknai “*political*” sebagai “dimensi antagonisme yang menjadi komponen pokok dari pergaulan manusia”;

sementara “*politics*” ialah “perangkat praktik-praktik dan institusi-institusi yang melaluinya tatanan diciptakan, mengorganisasikan koeksistensi manusia dalam konteks yang sangat berpotensi konflik akibat adanya kondisi-kondisi politis.” Secara eksplisit, Mouffe (2005) menjelaskan bahwa kondisi dewasa ini yang mengalami pendangkalan makna hal-hal yang politis ialah salah satu akibat dari hegemoni demokrasi gaya neoliberalisme.

Dengan membawa serta kesejarahan perihal penerjemahan *political ecology* yang telah dikerjakan oleh para pendahulunya itu, tulisan ini akan secara konsisten menerjemahkan *political ecology* ke dalam bahasa Indonesia sebagai “ekologi politis”. Hal ini beralasan dilakukan, mengingat juga, pada dasarnya para pendahulu di atas membahas persoalan-persoalan yang bersifat politis. White (2009), Arsel (2009), Afiff (2009), dan Sirimorok (2013) membahas lingkungan; Darmanto dan Setyowati (2012) dan Astuti (2013) secara lebih spesifik mengulas hutan; Cahyati (2014) dan Novenanto (2015) untuk tanah.

Marx dan Foucault dalam Ekologi Politis

Saya akan secara eksplisit menyandingkan Karl Marx dan Michel Foucault dalam tradisi ekologi politis. Ini pekerjaan berbobot yang menuntut pembacaan atas karya-karya kedua pemikir. Saya sangat terbantu oleh makalah yang ditulis Ekers dan Loftus (2008), khususnya untuk pemikiran Foucault.

Dalam permasalahan tata kepengurusan air, kita berhadapan dengan proses-proses besar yang merupakan ekspresi dari produksi dan reproduksi sistem kapitalisme yang terus berlangsung (seperti pembangunan, konversi lahan di daerah tangkapan air, infrastruktur pipa air minum, dan lain-lain). Dalam kondisi ini, penjelasan-penjelasan bagaimana ruang geografis diproduksi yang diajukan oleh para pemikir marxis—misalnya Lefebvre (1991) dengan teori produksi ruang (*production of space*), Smith (1990) dengan teori pembangunan yang tak merata (*uneven development*), dan Harvey (2005) dengan teori pembangunan geografis yang tak merata (*uneven geographical development*), yang mana semuanya tampil dengan ciri khas marxis memuat narasi tentang proses-proses ekonomi dalam skala besar—menjadi sangat berguna. Teori-teori itu mengantarkan kita kepada pemahaman bahwa sebenarnya apa yang sering kali dianggap alamiah pada dasarnya dihasilkan dari satu proses moda produksi kapitalisme.

Kalau kita memikirkan diktum Harvey (1996: 186) “*there is nothing unnatural about New York city*” secara serius, konsekuensinya adalah: jika kita memang sedang menuju sebuah cara pandang yang lebih

sistematik terhadap hidup, maka tidak ada alasan sedikit pun untuk meletakkan manusia, dan dengan demikian hasil kebudayaannya, secara istimewa sebagai bagian yang terpisah dari alam.

Dalam kasus ekologi politis air, diktum Harvey tersebut dapat diterima serta-merta mengingat hampir mustahil memisahkan air (apa yang sebelumnya diasumsikan sebagai alam) dari manusia. Relasi ini bisa dilihat dari dua arah. *Pertama*, air yang dibayangkan alamiah pada dasarnya melibatkan proses produksi dalam “penciptaannya”. Misalnya, proses-proses konversi lahan di sebuah daerah tangkapan air dan anyaman teknologi pemipaan air berkontribusi pada bentuk air seperti apa yang akan muncul. *Kedua*, 55–78% tubuh manusia tersusun atas air. Selain itu, dalam studi aliran air di perkotaan, kota sendiri adalah sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, analisis terhadap kota meniru peredaran ganda (sirkulasi dan metabolisme) darah dalam tubuh manusia (Swyngedouw 2006). Air mengalir dalam jaringan pipa-pipa (sirkulasi), lalu pada titik tertentu dikonsumsi oleh manusia (metabolisme).

Konsekuensi lain dari diktum Harvey adalah pertanyaan tentang apa itu perubahan. Yang muncul kemudian bukanlah perubahan sosial atau perubahan alam secara sendiri-sendiri, melainkan perubahan alam yang berlangsung bersamaan dengan perubahan sosial, yang mana keduanya saling memengaruhi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai “*socionatural*”. Istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “socioalamiah”. Istilah ini sudah diperkenalkan dalam berbagai tulisan, misalnya Heynen, Kaika, dan Swyngedouw (2006); Vandergeest (2008); dan Angelo dan Wachsmuth (2014).

Bertolak dari dua titik: *pertama*, cara pandang bahwa manusia adalah bagian dari sebuah ekosistem dalam metabolisme socioalamiah; *kedua*, koproduksi dan koevolusi perubahan antara natural dan sosial yang terpilin dalam perubahan socioalamiah itu sendiri, tulisan ini sampai pada satu pengertian tentang ekologi politis. Ekologi politis tidak lagi memosisikan manusia sebagai entitas yang terpisah dari alam sehingga melahirkan kajian tentang hubungan antara alam dan manusia sebagaimana didefinisikan oleh Sirimorok (2013: 21) dan Astuti (2013: 6). Kedua titik tolak tersebut memaksa pengertian ekologi politis dalam tulisan ini untuk keluar dari oposisi biner natur versus kultur, alam versus manusia, menjadi studi tentang perubahan socioalamiah itu sendiri beserta proses peminggiran yang menyertainya. Dengan agenda tunggal emansipasi, ekologi politis sebagai perspektif kritis muncul untuk melancarkan konfrontasi terhadap bentuk-bentuk peminggiran.

Dengan demikian, konsekuensi dari cara pandang terhadap tata kepengurusan air: krisis air menjadi bukan masalah alamiah,

melainkan dikonstruksi secara sosioalamiah. Hal ini mungkin bisa dijelaskan dengan pertanyaan berikut: mengapa masyarakat Kota Yogyakarta mengeluhkan krisis air padahal beberapa sungai mengalir di tengah kota? Jawabannya: karena air dari sungai-sungai itu tidak diolah (dipurifikasi, disalurkan, dikemas) menjadi air minum. Krisis air terjadi bukan karena ketiadaan air, melainkan karena air tidak dikelola dengan baik. Hal terakhir inilah yang dimaksud dengan “dikonstruksi secara sosioalamiah”.

Namun, untuk menjawab bagaimana manusia mengalami proses-proses perubahan besar itu, dibutuhkan pendekatan yang lain. Di titik ini, Foucault sangat membantu. Titik terbaik untuk memahami ini ialah dengan melihat penjelasan Foucault bahwa “Kuasa biologis, tanpa keraguan, tak bisa dipungkiri adalah elemen pokok dalam proses pembangunan kapitalisme” (Foucault 1978: 140–141; dikutip dalam Ekers dan Loftus 2008: 706). Lebih jauh, dalam penjelasan mengenai seks, Foucault mencatat bahwa represi terhadap aktivitas seksual di era modern telah membuat seks yang pada awalnya adalah ekspresi kebebasan menjadi “bagian yang tak terpisahkan dalam tatanan borjuis” (Foucault 1978: 5). Penjelasannya sederhana, dalam kondisi di mana para buruh secara sistematis dieksploitasi dalam sistem kapitalisme, sejauh mungkin sistem ini akan mengatur aktivitas seksual para buruh dengan satu tujuan yang sangat konkret: meningkatkan keuntungan. Prinsipnya, seluruh aspek kehidupan buruh harus didedikasikan untuk produksi kapitalisme.

Poin Foucault mengenai kuasa dalam mengatur objek biologis (*biopower*) sebenarnya sangat selaras dengan analisis Marx ketika menjelaskan topik para pekerja spesialis dengan peralatan-peralatan kerja mereka. Dalam sesi itu, Marx memperlihatkan bagaimana para pekerja yang melakukan pekerjaan teknis yang sama secara berulang lama-kelamaan akan menguasai teknik tersebut dengan sangat baik. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk proses produksi dalam sistem kapitalisme akan menurun karena, bagi para pekerja, “hidup mereka telah mengonversi tubuh menjadi sebuah mesin otomatis” (Marx 1982: 458). Singkatnya, jika Anda adalah seorang pekerja yang setiap hari bertugas menjahit tas, lama-kelamaan otot Anda, pikiran Anda, pendeknya diri Anda, akan menjadi sangat mahir dalam pekerjaan tersebut.

Langkah pertama untuk masuk ke ekologi politik ala foucauldian adalah dengan memahami apa itu relasi kuasa. Relasi kuasa, menurut Foucault (1978: 92–93), dapat dilihat dalam empat kerangka: *pertama*, sebagai keserbagaman relasi kekuatan yang bermain dalam lingkup di mana relasi-relasi kekuatan itu beroperasi, dan membentuk organisasinya sendiri; *kedua*, sebagai proses pertarungan dan

konfrontasi yang mengubah (*transform*), memperkuat, atau sebaliknya “mendiamkan” relasi-relasi kekuatan itu sendiri; *ketiga*, sebagai dukungan yang disalingtemukan oleh relasi-relasi kekuatan itu sehingga membentuk rantai atau sistem, atau sebaliknya, membentuk disjungsi atau kontradiksi yang membuat relasi-relasi kekuatan itu saling terpisah; *keempat*, sebagai strategi di mana relasi-relasi kekuatan itu bekerja, yang mana desain umum dan perwujudan konkretnya melekat pada aparaturnegara, dalam perumusan hukum, atau dalam berbagai bentuk hegemoni sosial.

Jejak-jejak pemikiran Foucault dalam ekologi politis dapat ditemukan dalam beberapa karya. Misalnya, Li (2007), yang dengan menggunakan teori kepengaturan (*governmentality*) menunjukkan bagaimana proses depolitisasi dalam pembangunan, dan dengan demikian, proses eksklusi ternormalisasi. Kooy (2008), contoh yang lain, masih dengan kepengaturan yang dipadukan dengan teori pascakolonial, mampu memperlihatkan bagaimana proses ketimpangan akses terhadap air minum sebenarnya sudah tertanam dalam jaringan pipa-pipa air yang terutama diperuntukkan bagi kalangan elite Batavia. Jaringan infrastruktur kolonial ini terus-menerus menginfus, sekaligus menentukan, semua proses akses yang timpang hingga pada era pascakolonial Jakarta.

Proses-proses depolitisasi itu terjadi dalam banyak kasus. Contoh lain apa yang kadang dianggap nonpolitis tetapi pada kenyataannya sangat politis, misalnya, kekuasaan yang birokratis dalam mesin pembangunan yang antipolitik di Lesotho (Ferguson 1994); pembangunan (*development*), sehingga Escobar (1995) memperkenalkan istilah “menemukan pembangunan” (*encountering development*)—tentang bagaimana Dunia Ketiga dikonstruksi melalui diskursus permbangunan; tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kasus Sub-Sahara era Kebijakan Penyesuaian Struktural dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Abrahamsen 2000); atau studi yang agak mirip dalam kasus Mesir oleh Mitchell (2002) di mana ia memperkenalkan istilah “teknopolitik” (*technopolitics*)—tentang peran jaringan pakar dan teknologi pengetahuan dalam “penemuan” dan “pengonstruksian” apa yang disebut petani. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana teknologi pengetahuan pada dasarnya ialah sebuah sistem, yang dengan bantuan Foucault kita dapat melihatnya lebih jelas, bagaimana jejaring relasi kuasa beroperasi.

Operasionalisasi penyandingan Marx dan Foucault (atau marxis dan foucauldian) dalam ekologi politis ini membutuhkan teknik tersendiri. Mengikuti premis marxis tersohor, Harvey (2005: 88), bahwa “kapitalisme adalah pembangunan geografis yang tak merata,” maka

tantangan yang muncul berikutnya ialah bagaimana memahami ekspresi ketidakmerataan dalam satu sistem besar kapitalisme, seperti akumulasi primitif (*primitive accumulation*), akumulasi melalui perampasan (*accumulation by dispossession*), deagrarianisasi, industrialisasi, atau urbanisasi, dalam pengalaman mikropolitik tubuh manusia pada saat terjadinya perubahan sosioalamiah.

Proses perubahan sosioalamiah bukanlah ruang kosong tanpa kontestasi. Proses peminggiran yang menyertainya selalu saja diikuti dengan perebutan terhadap akses. Ketika sebuah atau sekelompok entitas memperoleh akses, pada saat bersamaan ada yang tereksklusi. Inilah titik tolak resistensi. Jadi, saya menawarkan tiga serangkai (*triad*) akses, eksklusi, dan resistensi untuk menilik (a) ekspresi ketidakmerataan dalam operasi kapitalisme berskala besar dengan perspektif marxisme; (b) bagaimana operasi kapitalisme berskala besar yang menemukan bentuk konkret dan operasionalnya menyentuh mikropolitik tubuh manusia dalam proses transformasi sosioalamiah.

Bagian berikutnya, dengan demikian, ialah usaha untuk membangun definisi atas ketiga proses itu.

Proses-Proses Akses, Eksklusi, dan Resistensi

Akses

Tulisan ini meminjam pengertian “akses” dari Ribot dan Peluso (2003: 153) yang memaknai akses sebagai “kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai hal—termasuk objek material, orang, institusi, dan simbol.” Bagi Ribot dan Peluso (2003), kemampuan aktor untuk mengonversi sesuatu menjadi keuntungan sangatlah ditentukan oleh struktur kekuasaan. Kekuasaan, bagi mereka, berangkat dari pengertian yang dibangun berdasarkan teori Foucault sebagaimana disinggung di bagian sebelumnya, bukan berangkat dari analisis Marx yang sangat menekankan perkara ekonomi. Artinya, Ribot dan Peluso (2003) tidak mengunci persoalan kelas sebagai moda kekuasaan yang paling utama dalam masyarakat. Kekuasaan, dengan demikian, sebagaimana disebutkan Foucault (1978), ada di mana-mana dan relasional.

Namun, bagi Ribot dan Peluso (2003), pada beberapa titik, teori akses memiliki kesamaan dengan relasi kapital dan buruh dalam pengertian marxisme. Relasi eksploitatif antara kapitalis dan buruh pada dasarnya paralel dengan relasi antaraktor yang mengontrol akses. Di sini terdapat satu pembeda penting dalam relasi yang ada. Di satu sisi Marx sangat menekankan proses eksploitasi, di sisi lain teori akses sangat menekankan kontrol. Meski demikian, perlu dicatat bahwa

pada ujungnya kontrol terhadap akses itu sendiri dapat dikonversi oleh para aktor menjadi keuntungan.

Bagi Ribot dan Peluso (2003), relasi kontrol terhadap akses berbeda dengan relasi eksploitatif kapitalis dengan buruh karena pada dasarnya tidak mudah membagi-bagi masyarakat/semua orang ke dalam kelas kapitalis dan buruh. Adakalanya dalam hidup ini proses kontrol dimainkan oleh orang secara *on/off*. Dalam satu kesempatan para aktor bisa saling berkompetisi, dalam kesempatan lain aktor-aktor yang sama saling berkooperasi. Hatta, teori akses ialah teori tentang mekanisme bagaimana akses diperoleh, dipelihara, dan dikontrol oleh para aktor yang bermain.

Eksklusi

Pengertian “eksklusi” dalam editorial ini dipinjam dari Hall, Hirsch, dan Li (2011: 7) melalui pemaparan mereka tentang eksklusi orang dari tanah di Asia Tenggara. Eksklusi, dalam pemaknaan yang mereka bangun, ialah “cara di mana orang terhalang untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu.” Pengertian ini selaras dengan pengertian akses dalam paparan sebelumnya.

Teori eksklusi Hall, Hirsch, dan Li (2011) juga berakar pada teori kekuasaan. Mereka mengidentifikasi berbagai bentuk relasi kuasa yang mengatur proses eksklusi orang dari tanah yang berlangsung di Asia Tenggara. Beberapa relasi kuasa yang mengatur adalah peraturan, pasar, pemaksaan, dan legitimasi moral.

Berdasarkan kerangka teoretis sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa eksklusi adalah sisi lain dari akses. Lantas, mengapa kita masih membutuhkan teori eksklusi jika teori ini hanya menjelaskan sisi lain dari apa yang sudah dijelaskan teori akses? Hall, Hirsch, dan Li (2011) memiliki jawaban yang baik untuk mengantisipasi logika pembalikan ini. Dengan mempelajari proses eksklusi, menurut mereka, perhatian kita akan digiring untuk melihat pertikaian dan konflik. Jadi, tinimbang memerhatikan bagaimana atau melalui proses apa keuntungan mengalir sebagaimana ditekankan dalam teori akses, kita dapat melihat permukaan yang lain dari proses sosial yang sebenarnya bersisian itu. Implikasinya bisa lebih mendasar. Dalam melakukan studi kawasan, misalnya, di titik mana Anda memasuki sebuah kawasan akan menentukan pengalaman apa yang Anda miliki kelak.

Dengan demikian, melihat kedua proses itu, sisi lain dari eksklusi bukanlah inklusi, melainkan akses. Ini menyadarkan kita bahwa sebenarnya akses lebih luas daripada inklusi. Inklusi tampaknya terjebak pada pengertian sempit yang berhubungan dengan kewarganegaraan,

atau dalam konteks yang lebih teknokratik, bagaimana satu kelompok atau orang terlibat dalam program pembangunan yang biasanya dikendalikan oleh negara atau sistem. Adakalanya orang sama sekali enggan untuk “diinklusikan” ke dalam suatu sistem. Akses bukan soal keterlibatan dalam pembangunan atau sistem. Lebih luas, akses adalah soal kekuasaan yang relasional dan ada di mana-mana dalam pengertian Foucault.

Hall, Hirsch, dan Li (2011) juga mencoba membangun teori eksklusi agar keluar dari narasi besar proses kapitalisme. Secara lebih jelas mereka mengarahkan teori eksklusi lebih luas daripada proses-proses dalam korpus marxisme yang sudah diperkenalkan di atas, seperti penutupan atas sumberdaya bersama (*enclosure of the commons*), akumulasi primitif, dan akumulasi melalui perampasan. Penutupan atas sumberdaya bersama adalah proses konversi hak bersama (*common rights*) menjadi hak privat (Neeson 1993; De Angelis 2004). Akumulasi primitif adalah titik asal kapitalisme modern di mana komoditas diproduksi (Marx 1982: 873–940). Akumulasi melalui perampasan adalah pemaknaan ulang atas teori akumulasi primitif dalam konteks kekinian atau era neoliberalisme; akumulasi melalui perampasan bukan proses yang sudah selesai, melainkan proses yang berlangsung terus-menerus (Harvey 2003: 137–182).

Hall, Hirsch, dan Li (2011) mencatat bahwa banyak sarjana yang berasumsi bahwa proses penutupan (*enclosure*) dan perampasan (*dispossession*) dilakukan oleh korporasi besar demi terjadinya proses akumulasi. Tetapi, temuan mereka memperlihatkan bahwa proses-proses penutupan dan perampasan sumberdaya juga dilakukan oleh aktor yang lain, misalnya dalam proses konservasi hutan atau pembentukan wilayah bagi sebuah etnis. Komunitas atau masyarakat adat, misalnya, tidaklah serta-merta antieksklusi sebagaimana yang kerap dipersepsikan. Mereka sendiri saling mengeksklusi sesamanya. Li (2014) bahkan melangkah lebih jauh dengan eksplorasinya tentang eksklusi orang-orang dekat (*intimate exclusion*) di Sulawesi, yaitu proses eksklusi yang terjadi antartetangga.

Resistensi

Saya meminjam pengertian “resistensi” atau “perlawanan” (*resistance*) berdasarkan pengertian yang dibangun dengan sangat bernas oleh Turner dan Caouette (2009: 9) dalam studi mereka tentang perlawanan petani di Asia Tenggara. Bagi mereka, pertama-tama perlawanan harus dimaknai dari pemahaman tentang kekuasaan. Kekuasaan, bagi mereka, adalah permainan relasional antara yang dominan dan yang tersubordinasi. Mereka membangun pengertian perlawanan dengan

berangkat dari pemikiran tiga teoretikus, yakni Antonio Gramsci, Karl Polanyi, dan James C. Scott.

Bagi Gramsci, kelas penguasa memanipulasi sistem sosial dan moral masyarakat sehingga kapitalisme menjadi cara pandang bersama. Inilah proses pembentukan hegemoni. Artinya, hegemoni bekerja dengan menjaga keseimbangan antara paksaan dan persetujuan. Proses pemaksaan tidaklah terlalu melampaui proses persetujuan (Gramsci 2000: 261). Perlawanan, dengan demikian, adalah proses menyingkap hegemoni—yang disebut oleh Gramsci sebagai hegemoni tanding (*counter-hegemony*). Dalam konteks buruh di Italia, perlawanan adalah penaklukan negara, yang dapat dicapai dengan mengganti kelas dominan yang memiliki fungsi penting dalam tatanan masyarakat. Langkah pertama menuju tahap ini dalam perjuangan buruh ialah dengan merebut pabrik. Moda hegemoni tanding sangat pusparagam. Dari “perang (...) hingga boikot” (Turner dan Caouette 2009: 10).

Transformasi besar (*the great transformation*), bagi Polanyi (2001 [1944]), merujuk pada krisis kapitalisme ketika pasar mengambil peran terlalu banyak. Fungsi ekonomi seharusnya bagian dari fungsi sosial, bukan mendominasi fungsi sosial. Krisis bermula ketika berlaku pembagian masyarakat ke dalam marka ekonomi dan politik. Model susunan masyarakat seperti ini hanya berfungsi, jika dan hanya jika, keseluruhan masyarakat sudah tunduk pada logika ekonomi. Dominasi logika ekonomi ini menyebabkan munculnya komoditas fiktif seperti buruh, tanah, dan uang. Perlawanan, yang dalam istilah Polanyi disebut sebagai gerakan tanding (*countermovement*), adalah tanggapan terhadap proses komodifikasi.

Scott (1990) memunculkan suatu bentuk perlawanan yang berbeda. Ia menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja dalam proses subordinasi di berbagai kasus seperti perbudakan dan kasta. Bagi Scott, kelompok dominan tidak pernah sepenuhnya mampu mengambil kontrol dalam panggung kekuasaan. Selalu ada perlawanan. Baginya, ada dua jenis perlawanan. *Pertama*, perlawanan yang cenderung tertutup, yang dianggap sebagai komponen dari politik yang tak tampak (*infrapolitics*). Politik yang tak tampak pada dasarnya menantang kekuasaan secara tertutup, misalnya perlawanan sehari-hari atau akrab dikenal sebagai perlawanan scottian (Scott 1985). *Kedua*, perlawanan terbuka yang juga sangat luas bentuknya, mulai dari petisi, demonstrasi, hingga revolusi (Scott 1990).

Tulisan-Tulisan dalam Edisi Ini

Ada tujuh tulisan dalam Jurnal *Wacana* edisi “Ekologi Politis Air: Akses, Eksklusi, dan Resistensi” ini. Enam di antaranya berupa tulisan tematik yang membawakan kasus-kasus tersendiri dan satu rehal buku.

Tulisan *pertama* dari studi Yance Arizona dan Ibnu Sina Chandranegara tentang kasus pengujian (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Uji materi UU SDA tersebut dimenangkan oleh pemohon yang dimotori oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah. Dalam studi ini, Arizona dan Chandranegara meretas cukup jauh, dengan membidik permasalahan tidak hanya dalam konteks resital-resital hukumnya yang kaku, tetapi juga masuk pada wilayah yang lebih sosiologis mengenai perdebatan diskursif dalam proses uji materi UU SDA. Menariknya lagi, mereka juga mencoba melacak akar tuntutan pengujian UU SDA sebagai pelaksanaan jihad konstitusi dalam sejarah organisasi motor pemohon pengujian, Muhammadiyah.

Tulisan *kedua* oleh Agung Wardana membahas permasalahan reklamasi di Teluk Benoa, Bali, terutama dengan masuk sangat mendalam pada proses di mana ruang geografi mengalami neoliberalisasi, dalam konteks yang lebih spesifik di mana air sebagai ruang, yang tadinya adalah milik bersama, kemudian mengalami privatisasi. Analisis Wardana tidak serta-merta mengamini semua langkah politik yang diambil oleh gerakan penolakan reklamasi sebagai proses neoliberalisasi ini. Di beberapa aspek, meski sangat jelas menghormati gerakan penolakan reklamasi di Teluk Benoa, Wardana juga mengajukan beberapa poin kritik bernas yang patut dipertimbangkan oleh berbagai aktor gerakan dalam proses penolakan reklamasi di Teluk Benoa.

Tulisan *ketiga* oleh Wahyu Kusuma Astuti membahas proses urbanisasi perkotaan di Yogyakarta. Astuti menunjukkan dengan sangat jelas bahwa visi Yogyakarta sebagai kota pariwisata mengidap paradoks karena kepentingan bangunan-bangunan komersial seperti hotel dan apartemen. Paradoks di sini muncul karena pada saat yang bersamaan pengejawantahan visi kota pariwisata justru mengeksklusi warga kota dari akses mereka atas air.

Tulisan *keempat* oleh Elisabeth Augustina Issantyarni membahas persoalan proyek tanggul dan reklamasi di Teluk Jakarta. Ia menunjukkan kelemahan-kelemahan, atau yang dalam bahasanya disebut sebagai “paradoks”, infrastruktur hidrologi berupa tanggul. Dengan balutan jargon “untuk melindungi”, pada kenyataannya infrastruktur seperti tanggul menyimpan bom waktu bencana yang lebih katastrofik dalam dirinya sendiri. Issantyarni lebih jauh menyingkap bahwa

pada dasarnya proses mengunci permasalahan banjir di level teknik (teknikalisasi permasalahan) ialah bentuk dari pelucutan aspek-aspek politis (depolitisasi) peristiwa banjir itu sendiri dari akar persoalan yang melibatkan proses-proses besar seperti perpindahan manusia dan pembangunan gedung-gedung di perkotaan.

Tulisan *kelima* oleh Fuad Faizi dan A. Syatori mengungkapkan bagaimana proses-proses eksklusi warga di lereng Gunung Ciremai, Jawa Barat, muncul dalam berbagai bentuk proyek “pembangunan”, yang meliputi taman nasional, pengembangan energi panas bumi, dan reorganisasi teknik penyediaan air. Proyek-proyek tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari perluasan kapitalisme itu sendiri. Secara logis, Faizi dan Syatori menunjukkan bagaimana warga secara politis memaknai proyek-proyek yang secara teoretis sangat mungkin dipersiapkan bertolak belakang sebagai proses yang kongruen, yakni konservasi hutan versus ekstraksi panas bumi versus reorganisasi teknik pendisiplinan akses atas air.

Tulisan *keenam* oleh Delima Silalahi menjelaskan berbagai rezim kepengaturan lingkungan yang berkembang dalam usaha bagaimana seharusnya Danau Toba dikelola. Rezim-rezim itu, yang disebut Silalahi sebagai “wacana-wacana”, yakni Kawasan Danau Toba (KDT) sebagai kawasan strategis nasional, KDT sebagai taman bumi (*geopark*) dunia, dan KDT sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Pada dasarnya, sebagaimana dipaparkan Silalahi, wacana-wacana yang muncul itu belum menyentuh akar-akar persoalan yang ia identifikasi berupa maraknya aktivitas industri eksploitatif di sekitar Danau Toba.

Tulisan terakhir adalah rehal dari Ciptaningrat Larastiti atas buku Karen Bakker (2010) yang bertajuk *Privatizing Water: Governance Failure and the World's Urban Water Crisis*. Buku ini mengelaborasi persoalan-persoalan kepengurusan air, terutama proses privatisasi, di berbagai kota di dunia. Buku ini sampai sekarang masih mendapatkan perhatian luas dari para sarjana di bidangnya. Terbukti pada 2015, satu edisi khusus *International Journal of Urban and Regional Research* memuat diskusi tentang buku ini.

Keenam tulisan di atas menunjukkan bagaimana proses-proses akses dan eksklusi beroperasi. Akses dan eksklusi muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah akses atas dan eksklusi dari air sebagai ruang-hidup (kasus Teluk Benoa, Danau Toba, dan Teluk Jakarta) dan sebagai air minum (kasus pengujian UU SDA, Yogyakarta, dan Ciremai).

Dalam semua kasus yang dibahas, perlawanan menjadi narasi yang selalu muncul. Kalau kita melihat proses komodifikasi air di Indonesia dalam kerangka polanyian, pengujian UU SDA di Mahkamah Konstitusi bisa ditilik sebagai proses yang berusaha melakukan dekomodifikasi. Ini adalah gerakan tanding. Di Indonesia, gerakan

tanding di bidang air bukanlah satu-satunya. Proses serupa muncul dalam gerakan agraria dan lingkungan (Rachman 2012) serta di sektor hutan (Siscawati 2014). Perlawanan sehari-hari ala scottian di Bali, sebagaimana disinggung Wardana, membantu kita untuk memahami perlawanan terbuka yang tampak di permukaan. Jadi, meski pada dasarnya Scott, Polanyi, atau Gramsci datang dari akar teoretis yang berbeda serta melakukan teorisasi moda perlawanan yang berbeda (perlawanan sehari-hari dan perlawanan terbuka), gagasan mereka dapat direkonsiliasi satu sama lain. Turner dan Caouette (2009: 11) membantu kita memahami proses rekonsiliasi ini. Menurut mereka, “perlawanan sehari-hari membentuk dasar yang penting bagi materialisasi, dan kunci untuk memahami, perlawanan terbuka dalam skala yang lebih besar.” Dalam kasus Yogyakarta, sebagaimana diulas oleh Astuti, dijelaskan bagaimana para aktor yang mengalami kasus kekeringan di Kampung Miliran mampu membongkar diskursus dominan yang hegemonik sekaligus menawarkan diskursus alternatif dalam tata kelola air. Deskripsi perlawanan-perlawanan yang bersifat terbuka muncul dalam tulisan Faizi dan Syatori, Silalahi, juga dalam “manifesto penulis” dari Issantyarni.

Saya tidak perlu menuliskan satu per satu bentuk-bentuk perlawanan itu. Silakan pembaca yang budiman untuk menyimak sendiri dalam keenam tulisan di dalam edisi ini. Sebagai pertanggungjawaban teoretis selaku editor tamu Jurnal *Wacana* edisi ini, saya berusaha melakukan abstraksi sebagai usaha mendorong, sekaligus memberikan sketsa bagi siapa saja yang tertarik menggeluti, kajian ekologi politis air.

Hal-Hal yang Perlu Dipelajari Lebih Jauh

Ada beberapa hal yang menarik dari tulisan-tulisan di Jurnal *Wacana* edisi ini. Beberapa hal itu yakni munculnya pemikiran dari tradisi libertarian dalam ekologi politis, persoalan tentang *the common(s)*, masalah aktor nonmanusia, peluang untuk keluar dari teknokratisme pengetahuan, dan agenda emansipasi dari ekologi politis itu sendiri.

Ekologi politis, sebagaimana dipetakan dengan menguraikannya dalam tradisi marxian dan foucauldian di atas, haruslah diakui sangat jarang bertaut dengan tradisi libertarian. Pemikiran-pemikiran visioner dari Murray Bookchin, misalnya, masih jarang diperhatikan di bidang ekologi politis (Swyngedouw 2015). Simon Springer adalah satu nama yang patut diperhatikan dalam usahanya membangun tradisi ekologi politis libertarian. Foucault sendiri, kalau dilihat dari bagaimana ia memosisikan kuasa dalam mengatur objek biologis dan seks sebagaimana dijelaskan di atas, bisa dikelompokkan dalam tradisi pemikir marxis.

Sementara, tradisi pemikiran libertarian, meski juga mengamini kritik Marx terhadap kapitalisme, memiliki perbedaan tersendiri. Perbedaan mendasar terletak pada persoalan determinisme ekonomi dalam mengkritik kapitalisme. Pemikir ekologi anarkis seperti Murray Bookchin memiliki kritik yang radikal terhadap kritik Marx atas kapitalisme. Bagi Bookchin (1982: 217), kritik dengan menekankan permasalahan ekonomi, kepentingan kelas, dan substrat material dari sebuah masyarakat, sedemikian hingga, kritik tersebut pada dasarnya membawa sifat borjuis yang sebenarnya ingin dikritik. Kalau diambil permissalan bahwa substrat material adalah sel kanker dalam masyarakat kapitalisme yang ingin dikritik, kritik Marx sendiri pun mengidap sel kanker yang sama.

Lebih jauh, bagi Bookchin, revolusi masa kini bukan cuma diatur oleh garis-garis kelas sebagaimana dibayangkan oleh Marx (Bookchin 1969) menyebutnya sebagai “mitos proletariat”), melainkan juga datang dari berbagai pergerakan kelompok-kelompok yang merasakan beban eksploitasi, kemiskinan, rasisme, imperialisme, dan kelompok-kelompok yang frustrasi dengan konsumerisme, media massa, keluarga, sekolah, perbedaan antargenerasi, dan ketertindasan seksual. Dengan demikian, sasaran kritik bagi teori libertarianisme yakni hierarki dalam masyarakat itu sendiri, yang dalam hal ini diartikan lebih luas dari sekadar pertentangan kelas (Bookchin 1969).

Tulisan Wardana dengan sangat kritis membawa perspektif libertarian dalam analisisnya, sehingga ia dengan jernih bisa menilik permasalahan-permasalahan dalam gerakan penolakan reklamasi di Teluk Benoa, seperti masalah kasta dan hierarki antara kelompok elite dan basis dalam organisasi penolak reklamasi. Perspektif ini, tidak bisa tidak, menjadi satu domain yang ke depan sangat menantang untuk dieksplorasi dalam kaitannya tidak hanya di bidang ekologi politis air, tetapi juga dalam domain ekologi politis secara keseluruhan.

Poin *kedua* adalah permasalahan hak. Terinspirasi oleh Bakker (2007), Astuti mencoba mendorong hak bersama/kolektif atau *the common(s)*. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuka diskusi ke depan dalam hal rezim kepengurusan sumberdaya, terutama karena ide *the common(s)* juga ada dan didiskusikan di Indonesia. Misalnya, seperti yang dipromosikan oleh Hendro Sangkoyo (2014) sebagai ruang-hidup-bersama atau satu ulasan yang variatif muncul dalam *Digest Epistema* volume 6 (Epistema Institute 2016).

Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin membangun pengertian yang mendasar tentang *the common(s)*. Hardt (2010: 136) secara jelas menarik batas antara *the common* (tanpa “s”) dan *the commons* (dengan “s”). *The common* berarti “hasil dari pekerjaan dan kreativitas manusia

seperti ide, bahasa,” sementara *the commons* ialah “bumi dan semua sumberdaya yang berasosiasi dengannya: tanah, hutan, air, udara, mineral, dan lain-lain.”

Hardt (2010: 131) juga menjelaskan dengan sangat jernih hubungan antara ideologi dan tata kepengurusan sumberdaya, bahwasanya “Kita perlu menjajal kemungkinan lain, tidak hanya kepemilikan pribadi dalam sistem kapitalisme atau kepemilikan publik dalam sistem sosialisme, tetapi juga kepemilikan bersama dalam sistem komunisme.” Secara implisit Hardt telah menarik satu garis klasifikasi bahwa kepemilikan privat ialah sistem dalam kapitalisme, kepemilikan publik ialah sistem dalam sosialisme, dan *the common* (kepemilikan bersama/umum) adalah sistem dalam komunisme.

Dari ketiga pembahasan soal *the commons*, baik dari Astuti yang terpengaruh oleh Bakker (2007), promosi Hendro Sangkoyo terhadap *the commons*, diskusi tentang *the commons* dalam *Digest Epistema* volume 6 (Epistema Institute 2016), maupun pembahasan *the common(s)* oleh Hardt (2010), satu persoalan muncul. Ketiganya tidak menyinggung adanya tata kepengurusan sumberdaya dalam tradisi libertarian yang dikenal sebagai “*usufruct*” atau hak menikmati hasil (Bookchin 1982). Dalam konteks ini, tidak ada yang memiliki suatu properti, tetapi orang banyak berhak menikmati hasilnya. Konsep hak menikmati hasil ini kiranya lebih dekat dengan tata kepengurusan sungai-sungai di Sumatera di mana tidak ada yang memiliki sungai tetapi orang boleh mengambil ikan dari sungai-sungai.

Secara teoretis, poin tersebut bisa menimbulkan perbedaan yang sangat mendasar dalam proses pembangunan kapitalisme. *The common(s)*, meski merupakan hak bersama, memiliki celah yang lebih besar untuk mengalami komodifikasi dengan syarat para pemilikinya secara kolektif sepakat untuk menjual properti mereka. Sementara itu, dalam konteks hak menikmati hasil, karena ketiadaan kepemilikan, maka proses komodifikasi selangkah lebih susah.

Poin *ketiga* yang menarik dieksplorasi ialah peran aktor non-manusia sebagaimana dapat dibaca dari tulisan Silalahi dalam bentuk menurunnya kualitas air Danau Toba dan matinya jutaan ikan nila karena terserang oleh virus koi herpes. Resistensi dari tubuh air dan ikan seperti ini dapat ditilik dengan kerangka *Actor and Network Theory* (ANT). Teori ini melihat peranan agensi nonmanusia (Latour 2005; Holifield 2009) atau disebut oleh Bakker (2012) sebagai “materialitas air”. Dalam sudut pandang seperti ini, aktor, demikian Latour (2005) menggagas, ialah mereka yang menciptakan pembeda. Kalau tidak menciptakan pembeda, mereka bukan aktor. Adakalanya perubahan sosioalamiah, seperti berjangkitnya wabah malaria akibat pembangunan kanal-kanal irigasi di Mesir sebagaimana diulas oleh

Mitchell (2002), lebih banyak ditentukan oleh aktor nonmanusia. Perubahan-perubahan sosioalamiah ini melenceng dari apa yang direncanakan oleh aktor manusia.

Poin *keempat* adalah permasalahan variasi ilmu geografi dan politik yang dalam banyak kasus telah berubah menjadi sangat teknokratik. Dalam kasus ilmu geografi, ilmu menjadi teknokratik karena jarang terdapat diskusi mengenai proses mendasar sosioekonomi yang mentransformasikan alam, atau dalam diskusi di atas, sosioalamiah. Alih-alih, justru ilmu lebih memfasilitasi terjadinya permasalahan-permasalahan lingkungan tanpa terlebih dulu mencari tahu secara lebih mendalam penyebab masalah-masalah lingkungan. Ilmu-ilmu teknokratik semacam itu terbekukan dalam disiplin-disiplin seperti “manajemen sumberdaya” dan “manajemen lingkungan” atau, sebagaimana dicontohkan Castree (2001), “pembangunan berkelanjutan”. Konsep yang disebut terakhir ini tampak menarik tetapi pada akhirnya menjadi ide tanpa-bentuk yang dengan mudah menjadi pelayan yang mendukung agar proses “pembangunan” berjalan seperti biasanya (Castree 2001). Dengan kata lain, pembangunan sebagai proses produksi kapitalisme yang menjadi mesin bagi transformasi sosioalamiah menuju krisis sosioekologi yang lebih besar, tetap “berkelanjutan”. Dalam bidang politik, gejala ilmu teknokratik muncul dengan maraknya para analis politik dan lembaga survei yang mengandalkan statistik. Permasalahan politis kemudian acap kali tereduksi menjadi angka statistik dan kurang perspektif baik itu pertentangan kelas maupun relasi-relasi kuasa. Tawaran teoretis yang muncul dengan mengerangkai ekologi politis air dan apa makna ketakmerataan sebagai hasil dari proses corak produksi kapitalisme dalam bentuk akses, eksklusivitas, dan resistensi mungkin bisa menjadi salah satu alternatif untuk keluar dari jebakan teknokratisme pengetahuan.

Poin *terakhir*, di atas semua itu, pada dasarnya ekologi politis ialah sebuah proyek perumusan teori, sebagaimana dipraktikkan dengan sangat baik oleh Radamacher (2011), dan agenda emansipasi. Ekologi politis sebagai teori kritis hadir untuk melancarkan konfrontasi terhadap bentuk-bentuk dominasi, eksploitasi, dan hierarki yang hidup dalam satu tatanan. Langkah awalnya, sebagaimana sangat jelas disampaikan Foucault (1988: 10), ialah memainkan peran intelektual dengan mengubah pemikiran manusia. Tindak lanjut dari perubahan pemikiran ini dan operasionalisasinya dalam agenda yang lebih konkret menjadi tantangan bagi kita semua. Mengikuti logika ini, maka kegiatan menulis atau membaca saja kiranya jauh dari cukup. Pokoknya adalah emansipasi. Atau, mengikuti poin XI dalam *Theses on Feuerbach*-nya Marx (1845): “para filsuf hanya menafsirkan dunia dengan aneka cara,” tetapi, “intinya adalah mengubahnya.”

Keterangan Naskah

Substansi tulisan ini berasal dari proposal disertasi penulis yang bertajuk “‘Uneven Development’: Politicizing Flood Events and Urbanizing Infrastructural Interventions in (Post-)New Order Jakarta”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kolega penulis, Perdana Putri, yang sudah membaca dan mengomentari versi awal tulisan ini. Tetapi, hukum pertanggungjawaban semua isi di pundak penulis, tetaplah berlaku.

Daftar Pustaka

- ABRAHAMSEN, R. 2000. *Disciplining Democracy: Development Discourse and Good Governance in Africa*. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Zed Books.
- AFIFF, S. 2009. "Pendekatan Ekologi Politik: Sebuah Pengantar." *Tanah Air* Edisi Oktober–Desember 2009: 18–33.
- ANGELO, H. dan D. WACHSMUTH. 2014. "Urbanizing Urban Political Ecology: A Critique of Methodological Citysm." *International Journal of Urban and Regional Research* 39 (1): 16–27. DOI: 10.1111/1468-2427.12105.
- ARSEL, M. 2009. "Ekologi Politik: Dimana Ekonominya?" *Tanah Air* Edisi Oktober-Desember 2009:10-17.
- ASTUTI, R. 2013. "Ekologi Politik REDD+: Kontestasi Politik, Modal, dan Pengetahuan." *Wacana* XV (30): 3–13.
- BAKKER, K. 2007. "The 'Commons' versus the 'Commodity': Alter-Globalisation, Anti-Privatisation and the Human Right to Water in the Global South." *Antipode* 39 (3): 430–455. DOI: 10.1111/j.1467-8330.2007.00534.x.
- _____. 2010. *Privatizing Water: Governance Failure and the World's Urban Water Crisis*. Ithaca (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Cornell University Press.
- _____. 2012. "Water: Political, Biopolitical, Material." *Social Studies of Science* 42 (4): 616–623. DOI: 10.1177/0306312712441396.
- BOOKCHIN, M. 1969. *Listen, Marxist!* Diakses pada 30 April 2016. <https://www.marxists.org/archive/bookchin/1969/listen-marxist.htm>.
- _____. 1982. *Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy*. Palo Alto, California (Amerika Serikat): Cheshire Books.
- CAHYATI, D.D. 2014. *Analisis Ekologi Politik Penambangan Pasir Besi di Urut-sewu, Kebumen*. Yogyakarta: STPN Press.
- CASTREE, N. 2001. "Socializing Nature: Theory, Practice, and Politics." Dalam *Social Nature: Theory, Practice, and Politics*, disunting oleh N. Castree dan B. Braun, 1–21. Massachusetts (Amerika Serikat): Blackwell Publishers.
- DARMANTO dan SETYOWATI, A.B. 2012. *Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai, Kekuasaan dan Politik Ekologi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- DE ANGELIS, M. 2004. "Separating the Doing and the Deed: Capital and the Continuous Character of Enclosure." *Historical Materialism* 12 (2): 57–87. DOI: 10.1163/1569206041551609.
- EKERS, M. dan A. LOFTUS. 2008. "The Power of Water: Developing Dialogue between Foucault and Gramsci." *Environmental and Planning D: Society and Space* 26: 698–718. DOI: 10.1068/d5907.
- EPISTEMA INSTITUTE. 2010. *Digest Epistema*. Volume 6. Jakarta: Epistema Institute.

- ESCOBAR, A. 1995. *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. New Jersey (Amerika Serikat): Princeton University Press.
- FERGUSON, J. 1994. *The Anti-Politics Machine: "Development" and Bureaucratic Power in Lesotho*. Minneapolis (Amerika Serikat): University of Minnesota Press.
- FOUCAULT, M. 1978. *The History of Sexuality: Volume I: An Introduction*. Diterjemahkan dari bahasa Prancis oleh R. Hurley. New York (Amerika Serikat): Pantheon Books.
- _____. 1988. "Technologies of the Self." Dalam *Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault*, disunting oleh L.H. Martin, H. Gutman, dan P.H. Hutton, 16–49. Massachusetts (Amerika Serikat): The University of Massachusetts Press.
- GRAMSCI, A. 2000. *The Gramsci Reader: Selected Writings 1916-1935*. Disunting oleh D. Forgacs. New York (Amerika Serikat): New York University Press.
- HALL, D., P. HIRSCH, dan T.M. LI. 2011. *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapura: NUS Press.
- HARDT, M. 2010. "The Common in Communism." Dalam *The Idea of Communism*, disunting oleh C. Douzinas dan S. Žižek, 131–144. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Verso.
- HARVEY, D. 1996. *Justice, Nature & the Geography of Difference*. Massachusetts (Amerika Serikat) dan Oxford (Inggris): Blackwell Publishers.
- _____. 2003. *The New Imperialism*. Oxford (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Oxford University Press.
- _____. 2005. *Spaces of Neoliberalization: Towards a Theory of Uneven Geographical Development*. Stuttgart (Jerman): Franz Steiner Verlag.
- HEYNEN, N., M. KAIKA, dan E. SWYNGEDOUW. 2006. "Urban Political Ecology: Politicizing Production of Urban Natures." Dalam *In the Nature of Cities: Urban Political Ecology and the Politics of Urban Metabolism*, disunting oleh N. Heynen, M. Kaika, dan E. Swyngedouw, 1–19. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Taylor & Francis e-Library.
- HOLIFIELD, R. 2009. "Actor-Network Theory as a Critical Approach to Environmental Justice: A Case against Synthesis with Urban Political Ecology." *Antipode* 41 (4): 637–658. DOI: 10.1111/j.1467-8330.2009.00692.x.
- KOOY, M.E. 2008. "Relations of Power, Networks of Water: Governing Urban Waters, Spaces, and Populations in (Post)colonial Jakarta." Disertasi Ph.D. Vancouver (Amerika Serikat): The University of British Columbia.
- LATOUR, B. 2005. *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Oxford University Press.
- LEFEBVRE, H. 1991. *The Production of Space*. Diterjemahkan oleh D. Nicholson-Smith. Oxford (Inggris) dan Cambridge (Amerika Serikat): Black-

well.

- LI, T.M. 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Duke University Press.
- _____. 2014. *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Durham (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Duke University Press.
- MARX, K. 1845. *Theses on Feuerbach*. Diakses pada 30 April 2016. <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/theses.htm>.
- _____. 1982. *Capital: A Critique of Political Economy*. Volume I. Diterjemahkan oleh B. Fowkes. New York (Amerika Serikat): Penguin Books bekerjasama dengan New Left Review.
- MITCHELL, T. 2002. *Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity*. Berkeley (Amerika Serikat), Los Angeles (Amerika Serikat), dan London (Inggris): University of California Press.
- MOUFFE, C. 2005. *On the Political: Thinking in Action*. New York: Routledge.
- NEESON, J.M. 1993. *Commoners: Common Right, Enclosure and Social Change in England, 1700–1820*. Cambridge (Inggris), New York (Amerika Serikat), dan Melbourne (Australia): Cambridge University Press.
- NOVENANTO, A. 2015. “Manusia dan Tanah: Kehilangan dan Kompensasi dalam Kasus Lapindo.” *Bhumi* 1 (1): 1–11.
- POLANYI, K. 2001. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Massachusetts (Amerika Serikat): Beacon Press.
- RACHMAN, N.F. 2012. “Interaksi Gerakan-Gerakan Agraria dan Gerakan-Gerakan Lingkungan di Indonesia Awal Abad XXI.” *Wacana* XIV (28): 2–12.
- RADAMACHER, A. 2011. *Reigning the River: Urban Ecologies and Political Transformation in Kathmandu*. Durham (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Duke University Press.
- RIBOT, J.C. dan N.L. PELUSO. 2003. “A Theory of Access.” *Rural Sociology* 68 (2): 153–181. DOI: 10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x.
- SANGKOYO, H. 2014. “Hendro Sangkoyo: Kita Sekarang Berada pada Garis Depan Kemajuan dari Lex Mercatoria, Rezim Hukum untuk Membela Kepentingan Dagang.” Wawancara oleh Rio Apinino di *Left Book Review* Edisi XXVII/2014. Diakses pada 1 November 2016. <http://indoprogress.com/2014/10/hendro-sangkoyo-kita-sekarang-berada-pada-garis-depan-kemajuan-dari-lex-mercatoria-rezim-hukum-untuk-membela-kepentingan-dagang/>.
- SCOTT, J.C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Yale University Press.
- _____. 1990. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcript*. New Haven (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Yale University Press.
- SIRIMOROK, N. 2013. “Menuju Ekologi Politik: Sketsa Kajian Perubahan Iklim dan Kebencanaan di Indonesia.” *Wacana* XV (29): 17–42.

- SISCAWATI, M. 2014. "Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan." *Wacana* XVI (33): 3–24.
- SMITH, N. 1990. *Uneven Development: Nature, Capital, and the Production of Space*. Athens (Amerika Serikat) dan London (Inggris): The University of Georgia Press.
- SWYNGEDOUW, E. 2006. "Circulations and Metabolisms: (Hybrid) Natures and (Cyborg) Cities." *Science as Culture* 15 (2): 105–121. DOI: 10.1080=09505430600707970.
- _____. 2015. "Urbanization and Environmental Futures: Politicizing Urban Political Ecologies." Dalam *The Routledge Handbook of Political Ecology*, disunting oleh T. Perreault, G. Brdige, dan J. McCarthy, 609–619. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Routledge.
- TURNER, S. dan D. CAOUILLE. 2009. "Shifting Fields of Rural Resistance in Southeast Asia." Dalam *Agrarian Angst and Rural Resistance in Contemporary Southeast Asia*, disunting oleh D. Caouette dan S. Turner, 1–25. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Taylor & Francis e-Library.
- VANDERGEEST, P. 2008. "New Concepts, New Natures? Revisiting Commodity Production in Southern Thailand." Dalam *Taking Southeast Asia to Market: Commodities, Nature, and People in the Neoliberal Age*, disunting oleh J. Nevins dan N.L. Peluso, 206–224. Ithaca (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Cornell University Press.
- WHITE, B. 2009. "Di Balik Pertarungan Sumber Daya Alam Indonesia: Ekologi Politik dan Penerapannya pada Studi dan Perjuangan Lingkungan Hidup." *Tanah Air* Edisi Oktober-Desember 2009: 3–9.
- WILSON, J. dan SWYNGEDOUW, E. 2014. "Seeds of Dystopia: Post-Politics and the Return of the Political." Dalam *The Post-Political and Its Discontents: Spaces of Depoliticisation, Spectres of Radical Politics*, disunting oleh Wilson, J. dan Swyngedouw, 1–24. Edinburgh (Skotlandia): Edinburgh University Press Ltd.

